

POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2013 DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Oleh:
LUTFI ALMUTAHAR
NIM. E02110037

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

E.mail: lutfialmutahar11@gmail.com

Abstrak

Adapun judul penelitian ini Masalahnya berdasarkan gejala sosial dirumuskan permasalahannya sebagai berikut,(1)Bagaimana fungsi komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat diKecamatan PontianakTimur.Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan mengungkapkan,menganalisa fungsi komunikasi partai politik, peranan DPRD Kecamatan Pontianak Timur dalam menyerap aspirasi masyarakat sebagai aktor yang memperjuangkan dana spirasi masyarakat serta menganalisis mekanisme penyerapan aspirasi dalam bentuk program kerja atau kegiatan pembangunan oleh anggota DPRD Kecamatan Pontianak Timur.Untuk dapat, mengungkapkan secara faktual dan akurat objek penelitian digunakan metode diskriptif.Metode diskriptif adalah metode yang mencoba untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan dua gejala atau lebih. Dalam analisis mendalam fenomena sosial yang ada anggota DPRD sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, peran anggota DPRD di sini sebagai komunikator misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan dan akhirnya diterima. Upaya yang dilakukan Anggota DPRD dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjangkau aspirasi rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi maupun menemukan skalaprioritas kegiatan pembangunan kedepan, Anggota DPRD Kecamatan Pontianak Timur mengadakan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi Fraksi dalam menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses,di mana masa reses anggota DPRD masih dirasakan singkat, jadwal kegiatan anggota DPRD reses biasanya berbenturan dengan acara-acara yang mendadak yang harus dihadiri sehingga waktu resesnya terganggu, kemudian masalah dana terbatas, karena dalam kunjungan reses kelapangan memang sudah dibatasi dalam perencanaan anggaran sehingga tidak menutup kemungkinan waktu untuk reses kelapangan kurang.

Kata-kata Kunci :Pola KomunikasiAnggota DPR DalamMenyerapAspirasi

PATTERNS OF COMMUNICATION IN POLITICS PARLIAMENT ABSORBING MEMBERS OF SOCIETY ASPIRATIONS IN DISTRICT 2013 PONTIANAK EAST

Abstract

The title of this study "Patterns of Political Communication Member of Parliament in the public aspiration Absorb in 2013 dikecamatan East Pontianak". The problem is based on a social symptom of the problem is formulated as follows: (1) How does political communication function legislators to absorb public aspirations Pontianak East.Penelitian dikecamatan is intended to explain and reveal, analyze the communication functions of political parties, the role of Parliament in the Eastern District of Pontianak absorb public aspirations as an actor the fight for funds spirasi society and analyze the mechanism of aspiration in the form of a work program or development activities by members of the District Council Pontianak east.Untuk can, factually and accurately reveal the object of research used descriptive diskriptif.Metode method is a method that tries to give an overview of a phenomenon or the

relationship of two or more symptoms. In-depth analysis of social phenomena that exist legislators play an important role as a communicator to convey the aspirations of society, the role of legislators here as a communicator for example in the formation of public opinion to make a few ideas, which was initially denied, then considered and finally accepted. Efforts were made Members of Parliament in absorbing aspirations of the community, such as the activity in terms of aspiration of the people, know the developments and find skalaprioritas development activities in the future, Member of Parliament District of East Pontianak held a recess in the constituency (electoral district) respectively. The factors that could affect faction in absorbing aspirations of the people in their respective electoral districts, which are a matter of time recess, where the recess legislators still felt short, activity schedules legislators recess usually collide with events that suddenly that must be attended to recess time is interrupted, then the problem of funds is limited, since the visit recess space is already limited in budget planning so that it is possible to recess spaciousness less time.

Keywords: Communication patterns Members of Parliament In Absorbs Aspirations

A. LATAR BELAKANG

Komunikasi politik tidak mengalami perubahan kearah yang lebih demokratis tengah berlangsung di Indonesia Pemilihan umum (Pemilu) 1999, 2004 dan Pemilu 2009 2014, telah menghasilkan kepemimpinan baru, lembaga tidak lagi didominasi oleh partai tunggal dan proses pengambilan keputusan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) berlangsung lebih transparan, bahkan media dapat meliputi rapat-rapat DPRD secara langsung dan terbuka. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat lebih memahami keberadaan dan kegiatan DPRD. Di sisi lain, sebagai wakil rakyat anggota dewan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk itu anggota dewan dengan cara menjanging aspirasi yang berkembang melalui beberapacara, misalnya

penyampaian aspirasi secara langsung hasil pengumpulan pendapat umum dan

Temuan penelitian banyaknya kasus di beberapa daerah, konstituen mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan konstituennya, sehingga konstituen partai politik tertentu kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Atau anggota DPRD pernah berkunjung dan menyerap aspirasi konstituen, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah mereka.

Respon masyarakat terhadap lembaga perwakilan tersebut harus dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan ini harus dibuktikan oleh setiap anggota legislatif

dalam hubungannya dengan rakyat. Anggota legislatif mempunyai kewajiban untuk bertemu dengan konstituennya untuk berkomunikasi. Dalam menjalankan tugasnya seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya dengan melakukan komunikasi dengan konstituennya adalah hal wajib yang tak bisa dielakkan oleh wakil rakyat. Rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkannya kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan.

Salah satu ekspektasi pemilih dalam tersalurkan aspirasi mereka melalui anggota legislatif yang mereka pilih (DPRD), dengan mekanisme panyaringan dan penyaluran aspirasi, hal ini dapat dilakukan lewat mekanisme reses, waktu khusus yang diperlu bagi anggota DPRD dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada tataran birokrasi pemerintah, juga harus diimbangi dengan mekanisme yang dikembangkan di dalam partai politik dalam menyerap aspirasi konstituennya.

Berdasarkan uraian tersebut, disinyaliri bahwa pemilu bermanfaat untuk

menegakkan legitimasi penguasa dan pemerintah disamping bermanfaat bagi pembentukan perwakilan rakyat. Hanya saja hasil yang dicapai lebih bersifat formal, karena itu dalam pembangunan politik, perlu dikembangkan memanfaatkan pemilu bagi pembentukan legitimasi kekuasaan dan penentuan wakil rakyat. Keterwakilan politik

Ditinjau dari konteks dan situasi politik di Indonesia, peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 mencakup tiga komponen utama yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia ini juga berdampak pada Undang-Undang yang mengatur sistem pemerintah daerah dari Undang-Undang No. 5 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Kemudian Undang-Undang

otonomi daerah tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 membawa perubahan nuansa demokrasi didaerah, yaitu memberikan kewenangan yang besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia.

Pada era reformasi ini, Undang-

Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD, para anggota DPRD di beri hak prakarsa mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda), hak amandemen (mengubah Perda baik secara substansial maupun redaksional), dan hak anggaran termasuk mengajukan RAPBD, mengajukan bentuk dan arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja, menentukan alokasi anggaran menurut program dan lokasi sesuai pasal 19 ayat 1 huruf d sampai g. Dipihak lain isu teknis menyangkut know how atau pengetahuan bagaimana melaksanakan, menciptakan, melaporkan, melayani, menegakkan, mengendalikan apa saja yang diputuskan oleh mereka yang mendapat mandat dari rakyat sehingga harus dilaksanakan oleh mereka yang memiliki keahlian.

B. PERMASALAHAN

Sebagaimana yang telah dipaparkan di latar belakang mengenai pola komunikasi politik anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat pada tahun 2013 di Kecamatan Pontianak Timur terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Anggota anggota DPRD tidak menjalankan peran dan polanya secara baik dalam mengagregasikan kepada masyarakat.
2. Aspirasi masyarakat pemilih kecamatan Pontianak Timur sebagai pemilih merasa kecewa terhadap anggota DPRD yang terpilih.

C. TUJUAN

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini tentang pola komunikasi politik anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakatnya di Kecamatan Pontianak Timur, adalah untuk :

1. Menganalisa pola komunikasi partai politik, peranan DPRD Kecamatan Pontianak Timur dalam menyalurkan aspirasi masyarakatnya sebagai aktor yang memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Menganalisis mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk program kerja atau kegiatan pembangunan oleh anggota DPRD Kecamatan Pontianak Timur.

Tabel 1
Uraian Rekapitulasi Raperda Kota
Pontianak dari tahun 2013 yang
disetujui/dibahas

No	Tahun	Target	Perda yang di setujui	Usulan
1	2013	23	1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Pengendalian Pencemaran Air 3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Penyelenggaraan Ketenagaankerjaan di Kota Pontianak	Walikota Walikota Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD

Sumber :Sekretariat DPRD Kota Pontianak, data diolah 10 Juni 2015

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat diketahui hanya 17% saja perda yang di setujui sehingga menunjukkan rendahnya peran anggota DPRD kota Pontianak dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, di indikasikan politik anggota DPRD kota Pontianak tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kota Pontianak umumnya dan masyarakat Pontianak Timur khususnya di indikasikan merasa kecewa dan kurang diperhatikan untuk itulah peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut mengenai "Pola komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat pada tahun 2013 di Kecamatan Pontianak Timur":

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Komunikasi Politik

Komunikasi Politik menurut Dahlan (Hafied Cangara, 2011: 29) ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.

Meadow dalam Nimmon (2004:29) mengartikan bahwa " Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system" disini meadow memberi tekanan bahwa symbol-symbol atau pesan yang disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap system politik. Tetapi Nimmo sendiri yang mengutiMeadow dalam bukunya itu hanya memberi tekanan pada pengaturan umat manusia yang dilakukan dibawah kondisi konflik.

Kajian ilmu politik dalam konteks peran anggota legislatif (DPRD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakatnya, berada pada ranah komunikasi politik, dimana partai melakukan agregasi kepentingan (interest aggregation). Agregasi kepentingan yaitu menyalurkan segala hasrat atau aspirasi dan pendapat masyarakat

kepada pemegang kekuasaan (rejim) atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan-tuntutan (demands) ataupun dukungan-dukungan (supports) menjadi perhatian dan menjadi keputusan politik. Pola ini disebut juga dengan pola agregat (aggregative function). Tetapi apabila dilihat dari pola-pola yang harus dilakukan oleh DPRD, menurut Almond dalam Kartaprawira (1999 : 61-62), antara lain : pola pendidikan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, seleksi kepemimpinan, komunikasi politik, dan lebih lanjut menurut Almond pola tersebut adalah pola input dalam sistem politik

Peningkatan frekuensi penggunaan komunikasi politik oleh rakyat merupakan pertanda peningkatan demokratisasi politik, di sini hal yang penting adalah terbukanya saluran komunikasi politik masyarakat pada berbagai lembaga politik (Rauf, 2000 :35). Oleh karena itu perubahan politik dan anggota legislatif harus mendorong digunakannya saluran komunikasi politik langsung (seperti menerima delegasi rakyat yang menyampaikan tuntutan atau protes) dan bersikap toleransi dan arif terhadap pemberitaan di media massa yang menilai pelaksanaan tugas-tugas penguasa politik.

2. Pola Komunikasi Politik

Sebelum kita mendiskusikan secara lebih jauh mengenai bentuk-bentuk pola komunikasi politik dan faktor-faktor penghambat komunikasi politik, kita perlu mendiskusikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi dan komunikasi politik yang dipakai dalam penelitian ini. Komunikasi menurut D. Laurence Kincai (2000 : 13) adalah suatu proses di mana 2 orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Menurut Hafied Cangara (2011:20) Pola adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Komunikasi sebagai disiplin ilmu memiliki pola yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya pola komunikasi ditunjuk untuk: 1) memberi informasi, menghibur, 3) mendidik, 4) membentuk opini publik.

Dafid K. Berlo (Hafied Cangara,2011:20) dari Michingan State University menyebut secara ringkas bahwa pola komunikasi sebagai instrument interaksi sosial berguna untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat.

Selanjutnya, ada banyak pakar yang telah mengemukakan apa yang dimaksud dengan pola komunikasi politik itu. Michael Rush dan Philip Althoff dalam (ASM. Romli, 2009 : 26) misalnya berpendapat bahwa pola komunikasi politik merupakan proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan di antara sistem-sistem politik.

3. Konsep Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa Inggris, "aspiration" berarti cita-cita. Aspiration menurut kata dasarnya, aspire berarti cita-cita atau juga berkeinginan (Echols 1983:41).

Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976: 32) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup.

4. Pendapat Umum dan Pengambilan Keputusan

Pendapat umum adalah pendapat yang beredar dikalangan masyarakat terhadap suatu isu yang dipersoalkan oleh banyak orang. Bias dalam bentuk gossip, humor, saran atau keritik yang tidak sampai. Banyak penguasa yang tidak mengetahui hal itu sebab iya hanya mendapat laporan dari bawahannya, sementara orang yang ada diluar kekuasaan banyak memberi penilaian. Sultan harun Al-Rasyid dengan pembantunya si Abu Nawas dalam cerita 1001 malam di Bagdad, sering kali menyamar sebagai rakyat biasa untuk mendengar keluh dan kesah rakyatnya.

Kalau pendapat umum pada awalnya hanya milik para kalangan elit dan penguasa, maka sejak paham demokrasi bergulir pendapat umum sudah banyak merujuk kepada pendapat masyarakat biasa, Para penguasa dan pembuat kebijakan makin menyadari bahwa pendapat umum makin besar pengaruhnya dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat. Siapayang ingin sukses dalam bidang politik, pelayanan publik dan bisnis maka ia harus memahami dan menguasai pendapat umum. Sebab pendapat umum erat hubungannya dengan pemberian suara (vote) dalam memilih seorang pemimpin.

Dalam aktivitas politik, pendapat umum menjadi kekuatan dalam pengambilan keputusan, sebagaimana dikarakan oleh Ladd (1987) bahwa "Public Opinion is a central elemen in democratic decision making". Karena itu tidak heran jika para politisi sering mengklaim bahwa "the public is behind me".

E. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan mengungkapkan fenomena pemilihan anggota DPRD Kecamatan Pontianak Timur, yang telah dilakukan masyarakat Kecamatan Pontianak Timur pada tahun 2009-2014. Untuk dapat, mengungkapkan secara faktual dan akurat terhadap objek penelitian, penelitian ini mempergunakan metode diskriptif. Menurut Soehartono (1995:35) metode diskriptif adalah metode yang mencoba untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan dua gejala atau lebih. Dalam analisis mendalam fenomena sosial yang ada.

Sesuai dengan sifat dari objek penelitian, maka pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif

menekankan kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data atau informasi kualitatif, yang peneliti ikut serta mengungkapkan keberadaan partisipasi politik pemilih di Kecamatan Pontianak Timur. Nasution (2005: 52) mengatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif pada hakikatnya mengamati orang-orang dilingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami dunia empiriknya, memahami bahasa dan menafsirkan tentang dunia sekitarnya.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan metode, pendekatan, teknik pengumpulan data serta analisis data yang sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif. Di mana dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, sehingga dibutuhkan ketelitian untuk dapat mengkoordinasikan segala unsur yang terkait dalam penelitian baik secara teoritis dan praktis dilapangan penelitian, karena peneliti merupakan instrumen kunci dalam menggali informasi.

Peneliti menyusun rancangan dan jadwal penelitian terlebih dulu untuk dapat mengatur jalannya proses penelitian di lapangan. Kemudian dengan rencana jadwal penelitian tersebut peneliti berangkat

melakukan penelitian tentang “Pola komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat Di Kecamatan Pontianak Timur”.

Dengan rencana dan jadwal penelitian tersebut peneliti melakukan kegiatan penelitian di lapangan, mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, (dengan alat bantu: pedoman observasi, pedoman wawancara, alat tulis, dan kamera). Setelah mengumpulkan data peneliti akan berusaha mengolah data tersebut agar dapat dianalisis dengan rangkaian proses analisis data (reduksi, *display*, dan verifikasi data).

Maka penelitian akan diakhiri dengan melampirkan surat keterangan telah melakukan penelitian yang akan dikeluarkan oleh pihak tempat peneliti melakukan penelitian. Selanjutnya penelitian disusun dalam bentuk laporan yang ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas ilmu social dan politik Unifersitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2014.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di dilaksanakan di kantor DPRD Kota Pontianak anggota terpilih yang berasal dari DAPIL Kecamatan Pontianak Timur, yang ini dipilih sebagai

sasaran penelitian dengan diperkirakan adanya gejala politik, melalui rana komunikasi politik anggota dewan dan partisipasi politik pemilih di Kecamatan Pontianak Timur tahun pemilihan 2009 dan 2014.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian juga dibutuhkan adanya penentuan subjek penelitian sehingga penelitian yang akan dilaksanakan dapat terprogram dan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ini meliputi pemimpin pemerintah, sekretaris, dan anggota staf lainnya. Tokoh informal adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam aparat pemerintah tetapi diterima dan dihormati karena posisi mereka dalam komunitas (masyarakat).

Sedangkan yang objek dalam penelitian ini yaitu fenomena pola komunikasi politik anggota dewan terhadap aktivitas aspirasi masyarakat mulai dari individu, keluarga, sampai dengan warga masyarakat Kecamatan Pontianak Timur.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Alat utama penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sejak perencanaan, Pelaksanaan, penafsiran data dan menganalisis data sampai dengan laporan hasil penelitian

dilakukan oleh peneliti sendiri, Muhadjir,(1998:57).

5. Teknik Pengumpulan Data

Analisis penelitian kualitatif yaitu, Proses pengumpulan data bergerak dari lapangan empirik dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini meliputi kegiatan penelitian mengumpulkan data mulai dari lapangan hingga melakukan interpretasi apabila tidak signifikan, maka akan dilakukan kegiatan lapangan kembali untuk mencari dan melengkapi data itu, dalam tahap ini, ada dua macam teknik pengumpulan data yang digunakan: Pertama, wawancara mendalam (*Indepth-Interview*) yang dilakukan untuk mendapatkan informasi (data empiris). Adapun teknik wawancara dilakukan dengan triangulasi (*cross check*) dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu memuat garis besar yang akan ditanyakan, Arikunto (1998:126). Wawancara mendalam ini digunakan untuk mengungkapkan komunikasi politik anggota dewan dan partisipasi politik pemerintah di Kecamatan Pontianak Timur, instansi terkait. Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan informan untuk mendapat penjelasan langsung mengenai data yang diperlukan dengan mengacu pada pedoman wawancara agar tidak

menyimpang dari konteks penelitian. Pertama kali wawancara dilakukan dengan informan pangkal untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, dari informan pangkal itulah diperoleh informan lain yang dianggap bisa lebih menjelaskan.

6. Pengumpulan Data Sekunder

Dokumentasi yang akan digunakan untuk menghimpun data yang diambil dari dokumen, pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa dokumen dan laporan penting tentang data-data skunder keberadaan kantor DPRD Pontianak. Pengumpulan data dengan cara ini akan dianalisis secara mendalam dan dilakukan interpretasi. Dokumen dari penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui Jurnal, buku-buku referensi, surat kabar, karyatulis, data online buku, dan publikasi elektronik, laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan aktivitas anggota dewan, laporan berkala yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti membagi pola komunikasi politik anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi tiga pola yaitu : (1) pola formal ,(2) pola informal ,(3) tatap muka

1. Pola Formal

Ungkapan informan Pola formal ialah sebuah kegiatan penyaluran pejabat Negara umumnya dan pejabat Pontianak khususnya dalam memperhatikan masyarakat dan pola formal juga kegiatannya di atur dalam peraturan daerah.pola formal memiliki beberapa bagan yaitu (1) reses (2) musrembang (3) rapat kerja dan (4) kunjungan lapangan

a. Reses

Hasil temuan Berdasarkan wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa: Sebagai realisasi dari kewajiban anggota dewan untuk bertemu dengan masyarakatnya dilakukan pada masa reses. Bagaimana bentuk pertanggung jawabannya diserahkan kepada anggota dewan masing-masing. Yang jelas, mereka melakukan komunikasi dengan masyarakatnya untuk mendapatkan aspirasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan

yang akan diambil oleh pemerintahan daerah. Masa reses sangat penting bagi kedua belah pihak yaitu anggota DPRD dengan masyarakatnya.

Ditelusuri Seperti diungkapkan salah satu legislator asal kecamatan Pontianak timur (AL) saat wawancara, di mana diperoleh informasi bahwa DPRD Kecamatan Pontianak Timur dalam satu tahun, reses dilaksanakan tiga kali. Reses yang dilaksanakan pada periode ini memakan waktu selama lima hari. Kecamatan Pontianak Timur seperti yang diketahui memiliki 7 Kelurahan, yaitu Kelurahan Dalam Bugis, Kelurahan Tembelan Sampit, Tanjung Hilir, Tanjung Hulu, Kelurahan Seigon, Kelurahan Banjar Serasan dan Kelurahan Parit Mayor. Di mana setiap kecamatan dipastikan ada pendukung anggota DPRD

b. Musrembang

Berdasarkan wawancara dengan informan (ST) diperoleh informasi bahwa kami menempatkan posisi masyarakat dalam kerja-kerja DPRD, sebaiknya dimulai dengan mempertimbangkan beberapa cara pandangan kinerja dewan dimulai mempertimbangkan beberapa cara pandang kinerja dewan dalam mengakomodasikan dan responsif terhadap hal-hal : (1)Peningkatan partisipasi warga/masyarakat

dalam pengambilan keputusan dan proses kebijakan. (2) Kebijakan pelayanan publik yang menjadi prioritas bagi kesejahteraan masyarakat, (3) Transparansi dan akuntabilitas di lingkungan DPRD kepada masyarakat. (4) Peningkatan kapasitas dewan dalam merencanakan dan membangun kebijakan pelayanan publik dan keuangan daerah.

c. Rapat kerja

Hasil temuan di lapangan searah dengan wawancara pimpinan dewan (ST) bahwa rapat kerja adalah hal penting dan harus dilakukan secara rutin demi keberhasilan sebuah tugas. Bahkan mempersiapkan rapat kerja agar efektif dan efisien juga sama pentingnya dalam sebuah rapat. Sebab rapat yang terlalu lama tanpa solusi yang jelas, hanya akan membuat para pesertanya terbebani. Peserta rapat terdiri dari : eksekutif, legislatif dan masyarakat

d. Kunjungan lapangan

Hasil temuan ungkapan anggota DPRD kota Pontianak (AR) Dalam melakukan kunjungan lapangan anggota dewan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak aparaturnya di kecamatan ataupun aparaturnya kelurahan tentang perihal kedatangan mereka. Pihak kecamatan ataupun kelurahan akan mengundang perwakilan masyarakat untuk berdialog

dengan masyarakat untuk hadir. Pemberitahuan telah dilakukan oleh anggota dewan melalui aparaturnya di kecamatan maupun tingkat kelurahan, namun pada pelaksanaannya masyarakat yang hadir kurang dari yang diharapkan.

2. Pola Informal

Hasil temuan di lapangan diungkapkan informan anggota dewan Pola Informal ialah sebuah kegiatan penyaluran penjabat Negara umumnya dan penjabat Pontianak khususnya dalam memperhatikan masyarakat dan pola informal juga kegiatannya di atur diluar peraturan daerah atau kegiatan sehari-hari penjabat.pola informal memiliki beberapa bagan yaitu (1) kegiatan sosial dan (2) kegiatan relegius

a. Kegiatan sosial

Informan menjelaskan tentang Kegiatan sosial ialah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh banyak individu atau kelompok untuk kepentingan masyarakat bertujuan menguatkan solidaritas,kapasitas keterampilan kualitas hidup masyarakat. contoh kegiatan sosial yaitu : gotong royong, membantu orang miskin, membantu kesehatan dan lain-lain

b. Kegiatan relegius

Selanjutnya informan menjelaskan kegiatan relegius ialah Segala perbuatan

perkataan lahir batin seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai norma yang berpangkal pada ajaran-ajaran agama yang telah menjadi kebiasaan hidup masyarakat Contoh kegiatan religius yaitu : pernikahan, tahlilan , majelis ,ziarah kubur gereja viara dan hubungan induvidu dengan pencipta tuhan maha esa sesuai dengan agama kepercayaannya

3. tatap muka

Hasil penelitian di lapangan melakukan penyerapan aspirasi tentunya banyak upaya yang bisa dilakukan anggota DPRD, untuk menyerap aspirasi ini tentunya terjalin komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat, hubungan komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi antar personal.

Berdasarkan wawancara dengan informan, komunikasi kelompok yang dilakukan anggota DPRD dengan masyarakat adalah komunikasi yang dilakukan dengan sejumlah orang yang berkumpul bersama-sama dalam bentuk kelompok baik dalam jumlah kelompok kecil maupun kelompok besar. Komunikasi kelompok bersifat formal, lebih terorganisir dan lebih terlembaga daripada komunikasi antar pribadi.

G. PENUTUP

a) Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis kualitatif serta interpretasi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, di mana data-data yang dianalisis merupakan hasil yang diperoleh dari lapangan, diperoleh dari hasil wawancara dan observasi searah penggunaan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini yang mengarah kepada kesimpulan.

Kesimpulan merupakan tahapan yang penting karena sebagai inti dari hasil penelitian dan analisis. Oleh sebab itu sesuai dengan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti ungkapkan pada bab-bab terdahulu maka peneliti simpulkan sebagai berikut :

Peran DPRD sebenarnya secara umum masuk dalam dua bentuk perwakilan, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional, perwakilan politik diemban melalui pemilihan umum, sedangkan perwakilan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pada saat terpilih. Sejak tahun 2004, rakyat Indonesia telah memilih secara langsung calon anggota legeslatifnya, yang memperlihatkan bahwa kewenangan dan

kekuasaan yang diperoleh anggota DPRD sebenarnya adalah kepercayaan dari rakyat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Berdasarkan wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa, anggota DPRD sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, peran anggota DPRD di sini sebagai komunikator misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan dan akhirnya diterima.

Anggota DPRD Kecamatan Pontianak Timur dalam sistem pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, keuangan dan pengawasan akan tetapi Anggota DPRD Kecamatan Pontianak Timur berusaha sebagai media komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, baik untuk menyampaikan informasi, sosialisasi, motivasi dan sebagai tempat diskusi.

Upaya yang dilakukan Anggota DPRD dalam melakukan penyerapan inspirasi masyarakat, seperti kegiatan dalam hal menjangkau aspirasi rakyat, mengetahui perkembangan yang terjadi maupun menemukan skala prioritas kegiatan pembangunan ke depan, Anggota DPRD

Kecamatan Pontianak Timur mengadakan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing..

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan, ada beberapa pokok pikiran yang dapat diajukan sebagai saran-saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Komunikasi Anggota DPRD dengan pemilih sangat penting, komunikasi ini tidak hanya dilakukan oleh Anggota DPRD saat berkampanye saja, akan tetapi setelah mereka terpilih harus melakukan komunikasi, apapun bentuk komunikasi tersebut, baik secara individual, kelompok maupun dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat, agar masyarakat menilai bahwa orang-orang yang dipilihnya mampu mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Keinginan masyarakat adalah bahwa Anggota DPRD yang menjadi wakil masyarakat harus mampu menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat anggota DPRD oleh anggota legislatif merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja anggota DPRD. Realitas politik yang berkembang saat ini

mengisyaratkan kandidat terpilih (Anggota DPRD) kota/kabupaten, harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada alasan bagi Anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan budget sudah diatur sedmikian rupa.

2. Anggota DPRD harus mampu memanfaatkan waktu reses mereka untuk melakukan dialog dengan masyarakat dan turun langsung ke lapangan, sehingga keinginan masyarakat atau aspirasi yang diusulkan masyarakat benar-benar sesuai dengan keadaan lapangan bukan berbentuk rekayasa. Perlu ada penjadwalan dan penganggaran yang khusus bagi anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat, sehingga dengan adanya jadwal yang telah direncanakan tidak berbentrok dengan jadwal kegiatan yang lain.

H. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Almond, (1998). Sistem Politik Demokrasi. Surabaya : SIC.

Awang, Azam. (2000). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Croswell, Jhon W,(1994) *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publication.

Denzin, NK. Dan Lincoln, YS. (2004). *Handbook Of Qualitative Research*. London :SAGE Publications.

Garna, (1999). *Teori-teori Perubahan Sosial, Pasca Sarjana Bandung*. Judistira: Bandung.

Hafied Cangara, (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kantaprawira, Rusadi. (1999). *Dinamika Sistem Politik* .Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

K.R. Popper. (2002). *The Logic of Scientific Discovery*. New York: Basic Books

Kincai, Lawrence D. (2000). *Communication Network Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press a Divission of Macmillan Publishing.

Lincoln, Y.S & Guba, E.G. (2005). *Competing Paradigma in Qualitative Research in Denzin N.K And Lincoln Y.S etc, 1994, New Delhi, Sage Publications*.

Moleong. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :RemajaRc 82

Muhadjir (1998), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisike III cetakanke 8*. Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta

Nasution, S.(2005). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Penerbit Tarsito.

Nasution. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT Tarsito

Nimmo, dan Thomas Ungs. (1979). *Political Patterns in America: Conflict Representation and Resulation*. San Francisca: WH. Freeman and Company.

Patton, Michael Quinn. (2007) *Qualitative Education Methods*, Beverly Hills: Sage Publication

Rauf, Maswardi. (2000). *Komunikasi Politik, Masalah Sebuah Bidang Kajian Dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rasyid, Harun. (2000).*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Agama*. Pontianak STAIN

Riwu Kaho, (2002), *Analisa Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan*. Jakarta: Rineka Cipta

Saefullah, (2008).*Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Predana Media.

Sanit, Arbi. (1985). *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo

Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Agustino, Leo, 2007, *Perihal Ilmu Politik*, Penerbit. Graha Ilmu Yogyakarta.

-----, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Penerbit PT. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Gabriel Almond and Bingham Powell, 1998, *Comparative Politics A Developmental*

Approach, New Delhi, Oxford & IBH Publishing Company.

Kantaprawira, Rusadi, 1999, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Penerbit Alumni Bandung.

Nimmo, Daan, 1998, *Komunikasi Politik, Khalayak Politik dan Efek* (diterjemahkan oleh Jalaluddin Rakhmat), Penerbit PT. Remaja Karya, Bandung.

-----, 2004, *Komunikasi Politik, (Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung, PT. Remaja Karya.

Rauf, maswardi dan Mappa Nasrun, 2000, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.

Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali.

Widjaja, AW. 1993, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta, Bumi Aksara.

2. Undang-Undang :

UU. Nomor 22 tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD.

UU. Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD. DPRD, Prov. DPRD Kabupaten/Kota.

UU. RI. Nomor 27 tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Penerbit PT. Fokusmedia, Jakarta.

3. Data Internet :

Mumu Mukhlisin, Suara Kampus, Com.
Janinangor, April 2003, Jawa Barat,
ibnusalam@lycos.com

ASM,Romli,2009, www.romeliea.com:

Jack Plano, Dkk, Kamus Analisa Politik,
rajawali Jakarta, 1989. Copyright ©
www.romeliea.com





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Lutfi Almutahar
 NIM / Periode lulus : E02110037
 Tanggal Lulus : 31 Agustus 2015
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu administrasi negara
 Program Studi : Ilmu politik
 E-mail address/ HP : LutfiAlmutahar11@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Aspirasi* (*) pada Program Studi *Ilmu Politik* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Pola komunikasi politik anggota DPRD Dalam menyikap aspirasi masyarakat Tahun 2013 di Kecamatan Pontianak Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. Fitrianiyah, S.P., M.Si
 NIP. 196911222002121002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 12 April 2016

Lutfi Almutahar
 Lutfi Almutahar
 NIM. E02110037

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)